

ALASAN AMERIKA SERIKAT MELAKUKAN RENEGOSIASI NORTH ATLANTIC FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA) KE UNITED STATE-MEXICO-CANADA AGREEMENT (USMCA) TAHUN 2018

Bella Hikmatul Maula
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
071511233032

ABSTRAK

Kemunculan era dekonsentrasi dalam sistem internasional yang ditandai dengan naiknya aktor baru dan struktur hegemoni hierarkis telah mendorong terciptanya relasi antar negara yang semakin kompleks di lingkup regional. Ketika dihadapkan pada kondisi tersebut, Amerika Serikat yang berperan sebagai hegemoni di kawasan Amerika Utara berupaya untuk membentuk perjanjian perdagangan bebas baru yang dimaksudkan untuk mengeksklusi pergerakan Cina di ranah internasional. Hal ini tercermin atas upaya Amerika Serikat melakukan renegotiasi terhadap perjanjian perdagangan bebas dari North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA) ke United State-Mexico Canada Agreement (USMCA) pada tahun 2018 dengan menetapkan klausul-klausul baru sesuai isu-isu komprehensif yang terjadi di abad ke-21. Implementasi strategi aturan-aturan yang dibawa Amerika Serikat dalam perjanjian perdagangan bebas USMCA dapat dilihat melalui tiga indikator utama yakni berdasarkan isu-isu yang terjadi secara komprehensif di abad ke-21, adanya insentif di kawasan untuk melakukan integrasi yang ditandai melalui komitmen dari setiap negara selama berlangsungnya proses negosiasi berdasarkan aturan tertentu, dan secara eksklusif menambahkan klausul baru.

Kata-kata kunci: Kebijakan Luar Negeri, Amerika Serikat, Renegosiasi, Sistem Internasional, United State-Mexico Canada Agreement (USMCA)

ABSTRACT

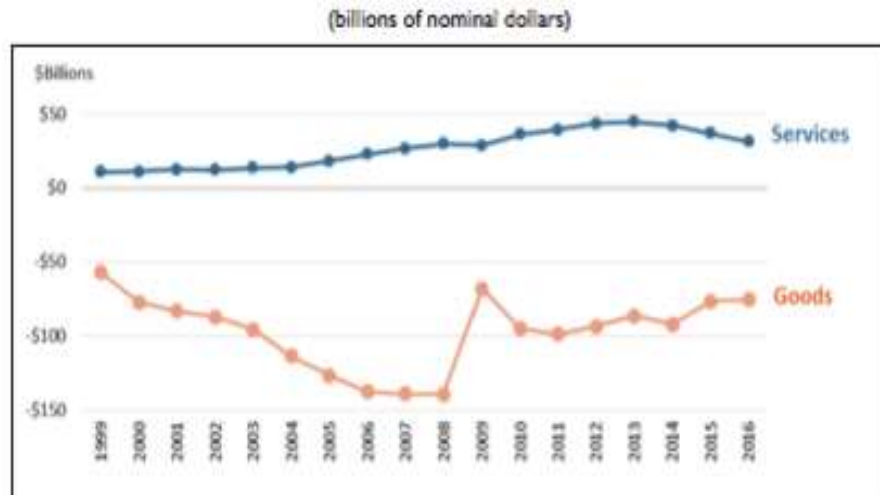
The emergence of the deconcentration era in the international system characterized by the rise of new actors and the structure of hierarchical hegemony has encouraged the creation of increasingly complex relations between countries in the regional sphere. When faced with these conditions, the United States, which served as a hegemony in the North American region, sought to form a new free trade agreement intended to exclude Chinese movements in the international sphere. This is reflected in the efforts of the United States to renegotiate free trade agreements from the North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA) to the United State-Mexico Canada Agreement (USMCA) in 2018 by establishing new clauses according to the comprehensive issues that occurred in the century 21st. The implementation of the strategies adopted by the United States in the USMCA free trade agreement can be seen through three main indicators, namely based on issues that occur comprehensively in the 21st century, there are incentives in the region to carry out integration marked through commitments from each country during the negotiation process is based on certain rules, and exclusion adds a new clause.

Key words: Foreign Policy, United States of America, Renegotiation, International System, United State-Mexico Canada Agreement (USMCA)

Amerika Serikat (AS) telah melibatkan diri dalam beberapa kerjasama perdagangan bebas dengan sejumlah mitra dagangnya di berbagai kawasan baik secara bilateral, trilateral hingga multilateral. Secara trilateral, terefleksi atas keterlibatannya dalam perjanjian perdagangan bebas kawasan Amerika Utara bersama Kanada dan Meksiko melalui North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA). Upaya kerjasama perdagangan bebas tersebut sebagai fokus utama kebijakan luar negeri AS yang diterapkan sejak abad ke-19. Dalam hal ini, AS akan terus memperluas nilai-nilai liberalisasi perdagangan bebasnya secara masif di berbagai belahan dunia. Akan tetapi AS pada era Donald J. Trump (Trump) adanya perubahan signifikan dalam tata kelola kebijakan luar negeri AS yang ditandai adanya keengganan dalam menjalankan berbagai kerjasama. Hal ini tercermin atas beberapa kebijakan kontraversialnya, salah satunya adalah memberikan ancaman untuk menarik partisipasi AS dalam perjanjian perdagangan bebas termasuk NAFTA.

NAFTA diberlakukan sejak 1 Januari 1994 sebagai perjanjian perdagangan bebas paling komprehensif yang telah dinegosiasikan oleh dua negara maju dan negara berkembang untuk menciptakan pasar terbesar pada barang-jasa. Sejak ketiga negara tersebut terlibat sebagai anggota NAFTA, adanya upaya untuk menetapkan komitmen liberalisasi perdagangan dengan memasukkan aturan-aturan dan disiplin baru untuk FTA di masa depan terkait persoalan-persoalan penting bagi AS termasuk ketentuan pembukaan pasar termasuk menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif, serta peraturan lain yang mempengaruhi berbagai sektor perdagangan seperti pertanian, prosedur bea cukai, investasi asing, daya saing industri, perdagangan jasa dan lain sebagainya (Murrill, 2019). NAFTA ditujukan untuk menjadi langkah awal kerjasama kawasan dalam merespon hambatan perdagangan, sehingga adanya peluang untuk memperkuat perjanjian sesuai isu-isu yang terjadi. Selama 23 tahun terakhir, perdagangan antara AS dengan mitra NAFTA telah meningkat lebih cepat dibandingkan perdagangan dengan sebagian besar negara lain yakni tiga kali lipat sejak perjanjian tersebut diimplementasikan. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya keuntungan yang diperoleh ketiga negara tersebut (Bergsten & Monica, 2017). Merujuk pada data Departement of Commerce (dalam Villarreal & Ian, 2019), sejak tahun 1993 perdagangan AS-NAFTA tumbuh lebih cepat daripada perdagangan dengan negara-negara non-NAFTA. Pada tahun 2011, perdagangan trilateral di antara mitra NAFTA mencapai \$ 1 triliun. Pada tahun 2016, Kanada menempati posisi pertama sebagai pasar utama untuk ekspor AS, sementara Meksiko berada di peringkat kedua dengan menyumbang 34% dari total ekspor AS pada tahun 2016. Sedangkan pada aktivitas impor, Kanada dan Meksiko masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga sebagai pemasok impor AS dengan menyumbang sebesar 26% dari impor AS. Sehingga secara general, total ekspor barang dagangan AS meningkat dari \$ 142 miliar menjadi \$ 525 miliar yakni sekitar 270%, sementara impor barang AS dari mitra NAFTA meningkat dari \$ 151 miliar pada tahun 1993 dan meningkat menjadi \$ 614 miliar pada tahun 2017 sebesar 307%. Sehingga berdampak pada meningkatnya surplus perdagangan jasa bersama Kanada dan Meksiko sebesar \$ 31,4 miliar pada tahun 2016.

Perdagangan Barang-Jasa AS-NAFTA Tahun 1993-2016



Sumber: CRS (dalam Villarreal & Ian, 2019)

Akan tetapi, ketika AS di era pemerintahan Trump memiliki antusiasme besar untuk melakukan renegotiasi terhadap NAFTA yang ditandai dengan dibentuknya perjanjian perdagangan bebas baru USMCA sebagai hasil renegotiasi NAFTA. Pada 18 Mei 2017, AS era Trump mengirim pemberitahuan 90 hari kepada Kongres yang ditujukan untuk merenegosiasi NAFTA dengan melakukan penambahan pada beberapa formulasi pengaturan di dalamnya. Trump mengancam untuk menarik AS dari NAFTA secara sepihak apabila Kongres tidak menyetujui terhadap pengimplementasian USMCA (Murrill, 2019). Upaya Trump untuk merenegosiasi NAFTA ditunjukkan melalui pertemuannya yang secara resmi dimulai pada 16 Agustus 2017 dan 1 Oktober 2018 bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di KTT La Malbaie, Quebec dalam agenda membahas isu-isu komprehensif yang terjadi di ranah internasional (Long, 2018). Perjanjian pendahuluan yang diusulkan dengan Kanada dijalankan melalui tujuh putaran renegotiasi NAFTA yang berlangsung selama 13 bulan setelah AS dan Meksiko mengklaim bahwa perjanjian pendahuluan yang dibentuk sebagai prinsip untuk merevisi aturan-aturan di dalam NAFTA. Sehingga, pada November 2018 ketika berlangsungnya pertemuan forum internasional G-20 di Buenos Aires, Argentina, Trump bersama Trudeau, dan Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto (Nieto) secara resmi menandatangani perjanjian United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) (Webb, 2018).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa AS sebagai negara utama yang turut meratifikasi NAFTA. Dalam implementasinya, NAFTA berdampak signifikan terhadap meningkatnya perekonomian ketiga negara tersebut. Namun AS pada era pemerintahan Trump enggan untuk mengimplementasikan NAFTA yang ditandai dengan adanya ancaman untuk menarik keterlibatan AS dari perjanjian tersebut. Sedangkan dalam kurun waktu setelahnya, AS melakukan negosiasi perjanjian perdagangan bebas USMCA yang diklaim sebagai hasil dari renegotiasi NAFTA. Maka dari itu, pembahasan ini menjadi menarik karena pertama, kedua perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian mengenai perdagangan bebas antar ketiga negara untuk membuka pasar semakin luas dengan menghapus hambatan tarif ataupun non-tarif, namun adanya perbedaan sikap AS terhadap kedua perjanjian tersebut. Kedua, AS menjadi negara utama dalam kedua perjanjian

mengingat sebagai hegemoni di kawasan tersebut sehingga setiap kebijakannya membawa pengaruh besar terhadap arah dari isi perjanjian.

Era Dekonsentrasi dalam Sistem Internasional: Atribut Sistem

Era dekonsentrasi dalam sistem internasional ditandai ketika *world power* mengalami delegitimasi atas kapasitasnya dalam mewujudkan *common goods* bagi negara-negara anggotanya di ranah internasional. Disisi lain, adanya kondisi atas hadirnya aktor baru sebagai *challenger* yang memiliki kekuatan besar untuk mengambil alih posisi *world power*. Dalam struktur hierarkis, meski ada satu *dominant power* namun terdapat kekuatan besar yang berpotensi dibandingkan dengan negara-negara lain di sistem internasional (Goh, 2013). Sistem yang tidak terkonsentrasi pada satu polar kemudian cenderung menyebabkan terjadinya konflik global. Berkaitan dengan hal ini, Fred Bergsten (2008) menjelaskan bahwa suatu negara harus memenuhi tiga indikator utama untuk memperoleh klaim sebagai negara adidaya di ranah internasional, 1) mampu mempengaruhi perekonomian dunia secara signifikan, 2) secara dinamis berkontribusi penting bagi pertumbuhan global, 3) melakukan keterbukaan dalam kegiatan perdagangan dan aliran modal dalam mempengaruhi negara lain. Hal ini didukung oleh George Modelski (1981 dalam Hudson, 2014) mengkategorikan ke dalam dua dimensi, yakni 1) perkembangan ekonomi yang meningkat secara signifikan dari kedua aktor sehingga memicu terjadinya rivalitas untuk mengekspansi dunia dengan pengaruhnya melalui korelasi yang dibentuk. Dalam hal ini, meski adanya penurunan kapabilitas dari *world power*, namun kedudukan atau kondisi perekonomiannya tetap diakui meski fluktuatif. Disisi lain, hadirnya *challenger* dengan kondisi perekonomiannya yang meningkat signifikan maka akan tercipta sistem multipolar bahkan unipolar seperti yang terjadi pada AS ketika menggantikan status Inggris. 2) peningkatan secara signifikan di bidang pertahanan dengan memproyeksikan kualitas militernya. Berkaitan dengan penelitian ini, AS berupaya merespon dan menyesuaikan kondisi nasional ataupun kawasan Amerika Utara di bawah lingkup pengaruhnya atas dinamika dekonsentrasi dalam sistem internasional yang direfleksikan dengan dilakukannya perubahan kebijakan luar negeri melalui transformasi kebijakannya dalam perjanjian perdagangan bebas tahun 2018.

Cina mengalami perkembangan signifikan dalam redistribusi kekuatannya dengan meningkatkan akumulasi kapabilitas negara di berbagai dimensi termasuk ekonomi dan militer dengan membangun aliansi bersama negara-negara dunia. Sejak dilakukannya reformasi ekonomi, Cina memiliki surplus neraca perdagangan dan valuta asing terbesar di dunia yang mengalami pertumbuhan cepat dari tahun 1979 hingga 2016 dengan rata-rata mencapai 10% GDP riil tahunan Cina (Morriso, 2018). Pada tahun 1990, GDP Cina *current* US\$59,716 miliar mengalami peningkatan di tahun 2017 yakni mencapai GDP sebesar US\$12,238 triliun. Berdasarkan persentasenya, GDP *growth* Cina berhasil meningkat dari -27,27% tahun 1961 hingga mampu mencapai 6,9% di tahun 2017 yang melampaui pertumbuhan AS dari posisi 2,3% tahun 1961 dan 2,217% di tahun 2017 (World Bank, 2017). Selain itu, Produk ekspor Cina mengalami kenaikan dari \$14 miliar pada 1979 menjadi \$2,3 triliun pada tahun 2017, sementara produk-produk impor meningkat dari \$ 18 miliar tahun 1979 menjadi \$ 1,8 triliun tahun 2017. Meskipun diklaim sebagai negara ekonomi berkelanjutan, Cina berhasil menyumbang lebih dari dua kali lipat ekonomi dibandingkan dengan AS atau Uni Eropa dan berhasil menempati posisi kedua sebagai GDP dan tingkat ekspor terbesar. Sehingga, ekspansi ekonominya

berpengaruh besar bagi negara-negara lainnya. Oleh karena itu, Cina telah menjadi salah satu negara dunia yang mencapai pertumbuhan ekonomi tercepat yang digambarkan oleh World Bank sebagai “the fastest sustained expansion by a major economy in history”.

Selain kapabilitas ekonomi, atribut sistem yang menjadi tolok ukur distribusi kekuatan suatu negara adalah kapabilitas militer. Di bidang militer, Cina secara intensif memodernisasi kemiliterannya sejak awal hingga pertengahan tahun 1990-an yang dimaksudkan dalam rangka mencapai strategi pembangunan Cina termasuk ekonomi dan militer. Dalam hal ini secara kuantitas, Cina membentuk People’s Liberation Army (PLA) sebagai label militer Cina yang ditempatkan dalam berbagai aspek yakni udara, laut, rudal balistik, dan lainnya (O’Rourke, 2018). Di bidang pengeluaran anggaran militer, Cina berhasil menempati posisi sebagai pembelanja militer terbesar kedua di dunia dan terus mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 1993. Menurut Global Power (2019), Cina telah menduduki peringkat ketiga dalam *global fire power* dengan total angkatan bersenjata sebanyak 2,693,000 termasuk 2,183,000 personil aktif dan 510,000 personil cadangan. Jumlah personel militer Cina yang sangat tinggi melampaui AS yang hanya 2,141,900 tersebut dinilai akan terus mengalami penambahan, sehingga menjadikan posisi AS semakin terancam atas pergerakan signifikan Cina. Selain itu, AS dan Cina menempati posisi teratas dalam peningkatan anggaran militer dunia. Pertahanan militer resmi Cina mencapai 1,4% dari produk domestik bruto untuk dekade terakhir dan peningkatan kualitatif di seluruh PLA. Pada tahun 2018, Cina mengalokasikan \$250 miliar untuk kebutuhan militer, dari 14% pengeluaran global. Tahun 2018 adalah tahun ke-24 peningkatan pengeluaran militer Cina yang hampir mencapai 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun 1994. Meski total anggarannya lebih kecil dibandingkan AS, Cina berhasil bergerak stabil dan mendapat keuntungan dari *latecomer benefit*. Dengan kata lain, Cina tidak harus berinvestasi dalam R&D teknologi baru dengan harga yang tinggi (Defense Intelligence Agency, 2019). Akan tetapi, Cina mengadopsi platform dengan metodenya *retrofits*, penggunaan teknologi ganda termasuk investasi langsung asing yang ditargetkan, pencurian kekayaan intelektual, eksploitasi akses ke teknologi, dan metode lainnya. Dengan begitu, Cina dapat memfokuskan diri dalam mempercepat modernisasi militernya. Pada akhirnya secara spesifik, era dekonsentrasi dalam sistem internasional telah menjadi salah satu indikator utama yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri AS.

Transformasi Kebijakan Amerika Serikat Era Trump dalam Perjanjian Perdagangan Bebas: Upaya Renegosiasi dari NAFTA ke USMCA

Proyeksi kapabilitas Cina di berbagai dimensi termasuk ekonomi dan militer telah mengubah tata kelola global menjadi sumber ketidakamanan serta menjadi ancaman besar bagi status AS sebagai *world power*. Dalam merespon hal ini, AS era Trump memproklamirkan doktrinnya “American First” yang ditandai dengan mengenakan tarif baru senilai \$ 34 miliar terhadap barang-barang Cina mencakup 800 lebih produk Cina di sektor industri dan transportasi, serta diberlakukannya pajak impor sebesar 25% pada barang-barang seperti televisi dan alat kesehatan. Trump dan anggota pemerintahannya mempercayai bahwa Cina melakukan “ripping off” dengan mengambil keuntungan dari aturan perdagangan bebas yang ditetapkan, sehingga akan merugikan perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Cina. Selain itu, upaya Trump melalui lingkup regionalnya diwujudkan melalui upaya untuk merenegosiasi perjanjian perdagangan bebas NAFTA ke USMCA. Ketika dihadapkan pada isu yang

terjadi secara komprehensif di abad ke-21, AS berupaya melakukan revisi dan penambahan klausul baru berdasarkan kepentingannya dengan doktrin “American First”, khususnya sebagai bentuk respon atas naiknya aktor baru dalam sistem internasional. Meski aturan-aturan yang ada dalam USMCA sebagian besar mencakup tiga negara AS, Kanada, Meksiko, akan tetapi terdapat klausul tertentu yang dijadikan justifikasi atas adanya korelasi signifikan antara dinamika yang terjadi di era dekonsentrasi atas naiknya aktor baru di sistem internasional sehingga mampu mempengaruhi perubahan pola kebijakan AS melalui perjanjian perdagangan bebas USMCA.

Ketika dihadapkan atas era dekonsentrasi dalam sistem internasional dan didukung adanya peluang berdasarkan “Article II of the Constitution” bahwa Presiden memiliki wewenang dengan saran dan persetujuan Senat untuk membuat perjanjian. Presiden dapat meminta perlakuan lebih cepat atas undang-undang implementasi NAFTA yang direnegosiasi berdasarkan Bipartisan Comprehensive Trade Promotion and Accountability Act of 2015 (TPA). Dalam aturan NAFTA, “Para Pihak dapat menyetujui setiap modifikasi atau penambahan pada perjanjian ini. Ketika disetujui dan disetujui sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dari masing-masing pihak, modifikasi atau penambahan merupakan bagian integral dari perjanjian”. Trump telah mengindikasikan bahwa tujuan utama dari kebijakan perdagangannya yang agresif adalah untuk mengurangi defisit perdagangan AS yang besar. Hal ini ditegaskan sebagai tujuan rancangan pendekatan awal untuk renegosiasi NAFTA. Pada 18 Mei 2017, Trump mengirim pemberitahuan 90 hari kepada Kongres tentang niatnya untuk memulai pembicaraan dengan Kanada dan Meksiko atas upaya renegosiasi dan modernisasi NAFTA, seperti yang disyaratkan oleh Trade Promotion Authority (TPA) tahun 2015. Pembicaraan secara resmi dimulai pada 16 Agustus 2017 yang kemudian negosiasi disimpulkan pada 30 September 2018. Pada 30 November 2018, USMCA ditandatangani berdasarkan tujuan untuk memodifikasi kebijakan perdagangan bebas dengan merevisi lingkup perjanjian yang lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman (Thornton, 2018).

Kevin Gallagher et al (2009), menganalisis alasan dilakukannya renegosiasi terhadap NAFTA karena NAFTA telah gagal mencapai tujuan yang ditetapkan di dalam aturan-aturannya. Alih-alih mempromosikan konvergensi pendapatan, upah dan standar, akan tetapi NAFTA cenderung menonjolkan asimetri ekonomi di Amerika Utara, NAFTA membutuhkan reformasi menyeluruh, seperti templat untuk perdagangan di masa depan perjanjian dinegosiasikan oleh pemerintah Amerika Utara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1) NAFTA dan perjanjian perdagangan lainnya berdasarkan pada templat NAFTA perlu reformasi mendalam untuk mempromosikan kemakmuran dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, 2) perjanjian perdagangan perlu membahas asimetri di antara perdagangan bermitra dengan lembaga yang mendukung dan didanai dengan baik. NAFTA didirikan beberapa lembaga penting, seperti Commission for Environmental Cooperation (CEC) dan North America Development Bank (NADBANK). Namun, mereka tidak diberi mandat ataupun dana untuk memungkinkan mereka membantu menguatkan instabilitas ekonomi. Selain itu menurut laporan The Heritage Foundation pada bulan Februari 2017 yang menguraikan tiga prinsip utama karena adanya keinginan untuk (1) modernisasi, (2) perluasan, dan (3) penghapusan aspek kontra-produktif. Transformasi tersebut terjadi karena adanya urgensi atas kondisi dunia yang terus berkembang, sehingga adanya perbedaan permasalahan dengan di tahun 1994 yang ketika itu internet masih dalam masa pertumbuhan dan perdagangan terjadi melalui

pertukaran barang-jasa secara fisik atau melalui investasi. Sedangkan saat ini, perdagangan barang-jasa dilakukan secara digital serta adanya kebutuhan untuk melindungi kekayaan intelektual yang meningkat signifikan (Whiting & Gabriella, 2019). Renegosiasi bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah dan lebih khusus untuk membangun kembali keseimbangan perjanjian. Dalam hal ini, Hadiza Hamma (2012) menjelaskan bahwa klausa renegotiasi atau negosiasi ulang dalam perjanjian dimaknai sebagai langkah untuk menetapkan kebijakan hukum, peraturan, atau tindakan kembali oleh pemerintah setelah ketentuan awal yang berdampak negatif pada kepentingan suatu negara. Agar proses renegotiasi bekerja dengan baik, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian mengandung makna yang jelas yakni mencakup, 1) perubahan keadaan, 2) dampaknya terhadap perjanjian, dan 3) tujuan dilakukannya negosiasi. Sehingga norma-norma dalam suatu perjanjian yang baru harus dipertimbangkan oleh para pihak sebelum mengimplementasikan perjanjian (Macedo dalam Hamma, 2012). Selaras dengan konteks ini, maka menurut Al-Emadi (2012) renegotiasi yang dilakukan termasuk dalam kategori *anticipated renegotiation* yang ditunjukkan ketika perjanjian itu sendiri menetapkan bahwa selama masa berlakunya, pada waktu yang ditentukan atau pada kejadian peristiwa yang ditentukan, para pihak harus merenegosiasi atau meninjau ketentuan-ketentuan tertentu. Renegosiasi ini dimaknai sebagai kegiatan yang valid karena pihak-pihak yang terlibat masih terikat satu sama lain dalam kontrak. Hal ini tercermin dalam aturan pada perjanjian perdagangan bebas NAFTA bahwa terdapat klausul yang menyebutkan untuk mendorong dilakukannya renegotiasi. Selain itu, renegotiasi ini dapat dilakukan karena berlangsung di bawah kerangka hukum yang ditetapkan dalam kontrak awal dan renegotiasi biasanya disarankan oleh salah satu pihak.

United State Mexico-Canada Agreement (USMCA) sebagai Bentuk Baru Perjanjian Perdagangan Bebas

Keterlibatan AS atas antusiasmenya untuk berpartisipasi di USMCA dengan pola kebijakan sesuai dengan doktrinnya “American First” yang didasarkan melalui dua indikator yakni, 1) diskriminasi terhadap pemain ekonomi asing dengan memadukan legitimasi normatif berdasarkan aturan di bawah WTO, dan 2) pembatasan perdagangan terhadap negara asing diluar perjanjian yang ditunjukkan melalui beberapa aturan dalam perjanjian tersebut. Doktrin “American First” AS secara empirik selaras dengan indikator yang termaktub dalam USMCA, sehingga dalam spesifikasinya aturan atau klausul baru yang di proposisikan oleh AS tersebut sesuai dengan doktrin yang dianutnya. Dalam hal ini terdapat tiga indikator dalam USMCA yakni 1) berdasarkan isu-isu yang terjadi secara komprehensif di abad ke-21, 2) secara geografis adanya insentif di kawasan untuk melakukan integrasi yang ditandai melalui komitmen dari setiap negara selama berlangsungnya proses negosiasi berdasarkan aturan tertentu termasuk berkomitmen melindungi nilai, norma dan tata aturan dalam perjanjian tersebut untuk mengurangi kebijakan distorsi perdagangan, 3) dalam merespon ancaman yang hadir dari aktor luar, secara eksklusif menambahkan klausul baru tentang perlindungan di beberapa dimensi seperti kekayaan intelektual, investasi, mata uang dan tenaga kerja. Aturan-aturan yang dibawa oleh AS sebagai bentuk penyesuaian terhadap isu-isu komprehensif di abad ke-21, AS menambahkan beberapa klausul baru ke dalam USMCA. Hal ini dinilai sebagai bentuk respon era dekonsentrasi di dalam sistem internasional guna mengeksklusi Cina sehingga akan menciptakan perdagangan bebas yang lebih komprehensif di lingkup regionalnya.

Pada pasal pengadaan pemerintah, adanya pembatasan dalam lapangan produksi seperti impor tercermin pada klausul baru yang dimasukkan ke dalam pasal-pasal selanjutnya terkait investasi, penyelesaian sengketa dan nilai tukar yang merupakan aturan utama dalam USMCA yang dimaksudkan sebagai upaya mengadopsi strategi negara non-demokratis yang cenderung menggunakan langkah oligarki melalui perusahaan yang dijalankan oleh orang-orang berkuasa dari golongan tertentu dan memiliki intensitas kerabat dengan pemerintah. Misalnya, mempromosikan transparansi dalam proses tender melalui informasi dan deskripsi tender online, menyediakan aplikasi online dan proses dokumentasi tanpa biaya. Aturan lain yang bertujuan untuk mendiskriminasi Cina tercermin pada pasal kekayaan intelektual yakni mengapresiasi dengan memberikan insentif para pemilik karya intelektual guna mendorong aktivitas ini yang berdampak pada perekonomian AS. Hal ini dilakukan karena mengingat Cina yang cukup mengabaikan kekayaan intelektual terlihat ketika berusaha melakukan *cheating* dalam memperoleh kekayaan intelektual dan merasa kesulitan untuk mengadopsi kebijakan ini. Pasal tenaga kerja sebagai indikator utama yang menyebabkan AS melakukan renegotiasi terhadap NAFTA. Tercermin dalam upaya membentuk dan memelihara badan-badan independen dan tidak memihak untuk mendaftarkan kegiatan serikat pekerja dan perjanjian perundingan bersama, membentuk Labour Courts dalam rangka mengadjudikasi perselisihan perburuhan dan memberlakukan undang-undang lain untuk melindungi hak-hak pekerja. Sedangkan dalam pasal lingkungan ditandai dengan penegakkan hukum lingkungan secara efektif melalui tindakan berkelanjutan untuk menarik perdagangan dan investasi. Selain itu juga mencakup kewajiban dan dorongan untuk melindungi lapisan ozon, melindungi lingkungan laut dari polusi kapal, mendorong konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, dan mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa perdagangan bebas USMCA dibentuk sebagai peluang untuk mewujudkan pola interaksi regional yang didukung atas adanya partisipasi dan komitmen dari negara-negara anggota dalam mengakses berbagai permasalahan mencakup isu-isu komprehensif perdagangan terkait. Meski isu-isu yang dimasukkan dalam peraturan USMCA tidak berada pada prevalensi perjanjian perdagangan bebas, akan tetapi urgensinya dinilai signifikan karena mengikuti perkembangan zaman yang secara masif mencakup seluruh dimensi. Selain itu, mengingat negara-negara yang terlibat berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian nasional maupun regional di era yang cukup kompleks khususnya pasca naiknya Cina di kancah internasional sebagai hegemoni baru. Berkaitan dengan cakupan isu-isu yang telah dipaparkan, adanya keselarasan dengan tujuan AS untuk merespon dekonsentrasi konstelasi dalam sistem internasional di tengah era dekonsentrasi dengan mengeksklusi Cina baik melalui aturan lama yang telah direvisi ataupun aturan serta klausul baru yang ditambahkan. Selain itu pembatasan terhadap Cina dalam klausul baru yang akan dimasukkan dalam pasal investasi terkait aturan ketika suatu negara anggota melakukan perjanjian dengan negara non-pasar. Sehingga pada hakikatnya, renegotiasi perjanjian perdagangan bebas dari NAFTA ke USMCA dimaksudkan sebagai langkah konkret untuk menguatkan kapabilitas regional dan mempertahankan pengaruhnya di kawasan regional maupun internasional mengingat pertumbuhan perekonomian Cina cukup signifikan sehingga kebijakan ini ditujukan untuk menghambat dinamika Cina dalam sistem internasional.

Kesimpulan

Era dekonsentrasi yang ditandai dengan adanya transisi tatanan dalam sistem internasional membawa implikasi signifikan terhadap perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sebagai *world power*, Amerika Serikat berupaya memperkuat kapabilitas lingkup regionalnya melalui dibentuknya perjanjian perdagangan bebas sebagai respon atas dekonsentrasi dalam sistem internasional tersebut berdasarkan doktrinnya “American First”. Perubahan kebijakan luar negeri AS yang terjadi dari era Obama yang lebih kooperatif dengan doktrinnya yang berfokus pada kawasan Asia-Pasifik, berbeda dengan Trump yang justru mengutamakan kekuatan di lingkup kawasannya yakni Amerika Utara selaras dengan doktrinnya “American First” telah memiliki konsekuensi terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam perjanjian tersebut. Hal ini terlihat atas penarikan diri Amerika Serikat dari perjanjian perdagangan bebas TPP yang diprakarsai oleh Obama, sehingga inisiatif yang digagas oleh Trump untuk melakukan renegotiasi NAFTA ke USMCA merefleksikan doktrinnya dan sebagai negara besar di lingkup regionalnya. Naiknya Cina atas kapabilitas ekonomi dan militernya yang mengalami peningkatan signifikan membuat Amerika Serikat semakin terancam karena dalam beberapa dimensi seperti GDP *growth* mampu melampaui AS. Sehingga hal tersebut mendorong Amerika Serikat untuk menerapkan kebijakan melalui lingkup regionalnya dengan dibentuknya perjanjian perdagangan bebas baru yang diklaim sebagai hasil renegotiasi dari NAFTA. Sebagai hegemoni di kawasan Amerika Utara, AS menambahkan beberapa klausul baru di USMCA termasuk perlindungan di beberapa dimensi termasuk kekayaan intelektual, investasi, mata uang dan tenaga kerja. Sehingga terdapat tiga indikator dalam USMCA yakni 1) berdasarkan isu-isu yang terjadi secara komprehensif di abad ke-21, 2) secara geografis adanya insentif di kawasan untuk melakukan integrasi yang ditandai melalui komitmen dari setiap negara selama berlangsungnya proses negosiasi berdasarkan aturan tertentu termasuk berkomitmen melindungi nilai, norma dan tata aturan dalam perjanjian tersebut untuk mengurangi kebijakan distorsi perdagangan, 3) dalam merespon ancaman yang hadir dari aktor luar, secara eksklusif menambahkan klausul baru tentang perlindungan di beberapa dimensi.

Daftar Pustaka

- Al-Emadi, Abdulla Talal. 2012. “The Renegotiating Clause in Petroleum International Joint Venture Agreements. University of Oxford
- Bergsten, Fred & Monica de Bolle. 2017. “A Path Forward for NAFTA”, Peterson Institute for International Economics
- Defense Intelligence Agency. 2019. “China Military Power: Modernizing a Force to Fight and Win”.
- Global Fire Power. 2019. 2019 China Military Strength [online]. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china#overview (Diakses 3 Mei 2019)
- Hamma, Hadiza. 2012. “The Role of Stability and Renegotiation in Transnational Petroleum Agreements”, *Journal of Politics and Law*
- Hudson, Valerie M., 2014. *Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory Second Edition*. Washington DC: Rowman & Littlefield, Ch. 6, pp. 161-182.
- Murrill, J. Brandon. 2019. “The President’s Authority to Withdraw the United States from the North American Free Trade Agreement (NAFTA) Without Further Congressional Action”, Congressional Research Service.

- Modelski, 1962 dalam Vinsensio Dugis, "Explaining Foreign Policy Change," Masyarakat Kebudayaan dan Politik.
- Morrison, M, Wayne. 2018. "China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States". Congressional Research Service.
- O'Rourke, Ronald. 2018. "China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities-Background and Issues for Congress". Congressional Research Service.
- Villarreal M Angeles & Ian F. Fergusson. 2019. "NAFTA Renegotiation and the Proposed United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)". Congressional Research Service.
- Webb, Dominic. 2018. "CETA: the EU-Canada Free Trade Agreement", House of Commons Library
- Whiting K. Tori & Gabriella Beaumont-Smith, 2019. "An Analysis of the United States-Mexico-Canada Agreement".